

**ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH OLEH INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

GUSNAWEDI
06 096 044



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG
2009**





| | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|
| Nomor Alumni Universitas | Gusnawedi | Nomor Alumni Fakultas |
|--------------------------|------------------|-----------------------|

a). Tempat dan Tanggal Lahir: Bayang, 01/03/1981. b). Nama Orang Tua: Nawajis dan Rostian. c). Fakultas: Politeknik. d). Jurusan: Akuntansi Pemerintahan. e). Nomor BP: 06096044. f). Tgl. Lulus: 27 Juli 2009. g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan. h). IPK: 3,43. i). Lama Studi: 32 Bulan. j). Alamat Orang Tua: Kapujan Kenagarian Kolo Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tugas Akhir D IV. oleh: Gusnawedi

Pembimbing 1. Amy Fontanella, SE. Ak. 2. Desi Handayani, SE. Ak.

ABSTRAK

Inspektorat Daerah selaku auditor internal Pemerintah Daerah memberikan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Penelitian yang dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Responden dari penelitian yang dilakukan ini adalah Inspektur, Sekretaris Inspektorat, Inspektur-inspektur Pembantu, Kepala-kepala Seksi, Kepala-kepala Sub Bagian, dan Staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pertanyaan mendalam diajukan kepada setiap responden, dimulai dari pemahaman terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum sampai kepada pemanfaatannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sudah menggunakan seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan tindak lanjut terhadap pengawasan dan pemeriksaan. Namun Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara optimal, dalam pelaksanaan tindak lanjut terhadap pengawasan dan pemeriksaan tersebut.

Tugas Akhir telah dipertahankan di depan sidang penguji, dan dinyatakan Lulus pada tanggal 27 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji:

| | | | | |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| Tanda Tangan | | | | |
| Nama Terang | Anda Dwi Haryadi, SE. Ak | Novrina Chandra, SE, MM.Ak | Eliyanora, SE, M.Ak, Ak | Amy Fontanella, SE. Ak |

Mengetahui:
Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM. Ak
Nama



Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

| | | |
|---------------------------|------|--------------|
| Nomor Alumnus Fakultas | Nama | Tanda Tangan |
| Nomor Alumnus Universitas | Nama | Tanda Tangan |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemberian kewenangan daerah (otonomi) kepada Kabupaten dan Kota menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban dari konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. Pemberian otonomi dapat berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam otonomi daerah, perencanaan strategis merupakan peran yang sangat vital yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah untuk mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya, karena di sanalah akan terlihat dengan jelas peran Pemerintah Daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan terutama alokasi keuangan daerah dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru yang sesuai dengan arah reformasi tata kelola keuangan negara/daerah.

Menurut Halim (2004), dewasa ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berbagai pihak yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan masyarakat luas mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yakni DPRD dan masyarakat luas.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Di akhir penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, bahwa pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambil keputusan ekonomi, tidak pernah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai saat ini. Akan tetapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan sebagai alat untuk reviu sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diaudit oleh BPK, agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diaudit oleh BPK, Inspektorat Daerah kemudian menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut terhadap pengawasan dan pemeriksaan. Dalam melakukan tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan ini, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hanya melihat isi Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, tanpa memahami kembali isi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat oleh DPKD selaku entitas pelaporan.

Di samping itu, minimnya tenaga akuntansi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, membuat pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum optimal. Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hanya dijadikan sebagai dokumen pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas Regional Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aherudin. (2008). "*Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*," 1 – 3. Jurnal Akuntansi Indonesia.
- Amrizal. (2004). "*Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor*." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Arianto. (2008). *Manfaat Informasi Akuntansi*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2008. **Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.**
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi dan Halim. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Hapsari, Andhisa Setya. (2008). "*Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Audit BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)*." Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia.
- Harahap, S. (2004). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Heryawan. (2008). *Forum Komunikasi Jabatan Fungsional Auditor*. <http://www.jabar.go.id>.
- Machmud, Elmi. (2007). "*Pandangan Bawasda atas Peran Eksternal Auditor dalam Mendorong Akuntabilitas Penyelenggaraan Keuangan Daerah*." <http://www.bawasda.sebagai.auditor.internal.pemda.co.id>.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, M., Sulistyawati, F., Purwanugraha, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Jogjakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2008, tentang **Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan.**
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2008, tentang **Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektoral Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008, tentang **Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**